

Keragaman Swiss dalam Kesatuan: Cermin Keberhasilan Integrasi

Rizki Damayanti

Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina

ABSTRAK

While Switzerland only has territory of 41.285 km with a population of 7.58152 million (year 2008), this country has accreditation as a very good country in the world. Switzerland recognizes as a neutral, trusted, nationalist, integrity, respect for religious differences and ethnic population, giving priority to the education of its citizens and uphold democracy. The character is then brought the nation of Switzerland as the most prosperous and secure country in the world with the lowest crime rate and the illiteracy rate is almost 0 percent. Internalization of characters that are and has been passed by the nation is not a quick and easy process. This process takes a long and consistent way so that it can take root on each of its citizens. One of the most effective medias of this process is the nation's respect for diversity of ethnic, linguistic and religion.

Keywords: *ethnic diversity, linguistic diversity, religion diversity, federation.*

Meskipun memiliki luas wilayah hanya 41,285 km dan populasi sebesar 7,58 juta (2008), Swiss termasuk negara dengan reputasi baik di dunia. Swiss dikenal sebagai negara netral, terpercaya, nasionalis, memiliki integritas, sangat menghargai perbedaan agama dan etnis, memprioritaskan pendidikan bagi warga negaranya, dan menegakkan demokrasi. Karakter tersebut telah membawa Swiss sebagai negara makmur dan aman dengan tingkat kriminalitas terendah dan tingkat buta huruf hampir nol persen. Internalisasi karakter tersebut tidaklah mudah dan instan, namun melalui proses yang panjang dan konsisten sehingga mengakar kuat di dalam diri warga Swiss. Negara ini telah melakukan proses internalisasi karakter secara efektif melalui penghargaan tinggi terhadap keberagaman etnis, bahasa, dan agama.

Kata-Kata Kunci: *keragaman etnis, keragaman bahasa, keragaman agama, federasi.*

Tidak banyak contoh negara-bangsa modern dengan warisan sejarah yang stabil seperti yang ditunjukkan oleh Swiss. Dalam dinamika dunia internasional yang seringkali diwarnai konflik nasional dan internasional, genosida, konflik etnobudaya, keberadaan Swiss justru menawarkan sebuah cahaya lain yaitu cermin keberhasilan integrasi multietnis (Schmid 2001, 29). Swiss sebagai sebuah negara-bangsa, bukan hanya stabil dalam politik dan pemerintahan, mapan dalam ekonomi, tetapi juga percaya diri dalam percaturan internasional. Bahkan, munculnya kembali akhir-akhir ini isu konflik etnis dan linguistik berbasis sentimen nasional di beberapa negara Barat -yang sebetulnya menyandang citra politik stabil-. misalnya isu nasionalisme Quebec di Kanada, isu nasionalisme Catalonian dan Basque di Spanyol, Walloon nasionalisme di Belgia, nasionalisme Irlandia di Inggris, tidak terjadi dalam kasus Swiss.

Kondisi ini menempatkan Swiss senantiasa bertahan sebagai sebuah contoh negara-bangsa multietnis yang stabil. Paradoks Swiss kemudian menjadi sebuah anomali yang menarik bagi pengkaji sejarah, ilmu politik, dan federalisme. Dalam buku *Nationalism and Liberty*, Hans Kohn (1956, 8), seorang ahli teori pembentukan nasional, menyebutkan bahwa "meskipun Swiss hanya sebuah negara kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, tetapi negara ini sama sekali tidak memiliki ancaman terkait isu nasionalisme yang di banyak belahan dunia justru merupakan sebuah ancaman."

Tulisan ini tersaji dalam tiga bagian. Bagian pertama dimaksudkan untuk menyajikan secara singkat tinjauan historis Swiss sejak awal proses terbentuknya Swiss hingga mengalami fase perubahan dari konfederasi menjadi sebuah federasi. Bagian kedua menjelaskan keragaman yang menaungi Swiss terkait keragaman etnis, linguistik dan juga agama. Bagian terakhir berupaya memberikan argumentasi tiga hal utama yang menjadi dasar kestabilan nasional Swiss. Simpulan akhir tulisan ini tentu saja diharapkan dapat menjadi pembanding yang bermanfaat bagi upaya pembangunan negara-bangsa modern yang juga memiliki latar belakang keragaman sebagaimana yang terjadi di Irak, Sri Lanka, Israel dan Palestina, Kashmir dan Pakistan, Irlandia dan Inggris, Spanyol, Kanada, dan bahkan Indonesia.

Swiss, Dari Konfederasi Menjadi Federasi

Sejarah Swiss diawali pada 1291 dengan pembentukan sebuah Konfederasi Swiss antara Kanton Uri, Schwyz, dan Unterwalden yang masing-masing merupakan kanton berbahasa Jerman (Gillet 1989, 1-3). Di awal terbentuknya konfederasi, Swiss merupakan sebuah negara kecil dengan konsep aliansi militer yang didirikan untuk menghadapi

sentimen agresif dan ekspansionis Rudolf dari Habsburg, yaitu raja baru dari Jerman. Dalam perjalanannya, Swiss kemudian berhasil memperluas wilayahnya dengan mengikutsertakan Kanton Lucerne (1332), Zurich (1351), Glarus (1352) dan Bern (1353) sebagai bagian dari Konfederasi Swiss (Rappard 1990, 12). Pada abad ke-16, jumlah kanton yang bergabung dalam konfederasi kemudian bertambah menjadi tiga belas kanton dimana kondisi ini kemudian menempatkan Swiss sebagai salah satu kekuatan militer yang dihormati di Eropa.

Seiring dengan terjadinya perubahan dalam perkembangan kawasan Eropa pada abad ke-18, Swiss ikut mengalami penguatan nilai sebagai wujud patriotisme nasional Swiss. Landasan berbangsa dan bernegara Swiss kemudian berubah, yaitu bukan menekankan pada kerjasama dan aliansi militer sebagai kekuatan pemersatu melainkan pada semangat pemahaman konteks historis dan nilai-nilai demokrasi antarkanton yang ingin tetap dipertahankan. Maka, pada akhir abad ke-18, semangat baru Swiss sebagai sebuah negara-bangsa inilah yang dijadikan platform dasar bagi keberlangsungan Swiss modern pada abad berikutnya.

Revolusi Perancis dan invasi Napoleon pada 1798 menandai akhir konfederasi kuno Swiss sekaligus menjadi sebuah awal yang baru bagi Swiss (Steinberg 1992, 27). Bila negara-negara seperti Jerman, Italia dan Polandia menolak cita-cita Revolusi Perancis, maka Swiss justru menunjukkan reaksi yang berbeda. Swiss menerima dan menyerap pelajaran dari Revolusi Perancis dan hal ini kemudian menjadi awal sebuah negara-bangsa Swiss yang baru. Di bawah pemerintahan Napoleon, Konfederasi Swiss dibongkar dan digantikan dengan entitas Swiss baru yang ditandai dengan berdirinya Helvetic Republik pada tahun 1803. Berdirinya Republik Swiss yang baru, yaitu sebuah federasi dari tiga belas kanton, dideklarasikan dalam Konstitusi Swiss baru yang mendasarkan pada konsepsi pengakuan hak-hak dan kebebasan manusia.

Konstitusi yang baru, mengubah Swiss menjadi sebuah negara federalis yang modern. Konstitusi 1803 ini juga menghapuskan hak-hak istimewa kelas sosial yang sebelumnya ada, memberikan kesamaan hukum kepada individu di semua wilayah, menerima bahasa Italia menjadi bahasa resmi ketiga di Swiss, mencetak uang koin dan perangko nasional (dicitak dalam bahasa Latin dengan maksud tidak memihak kepada salah satu kelompok linguistik yang ada di Swiss) serta untuk pertama kalinya menciptakan sistem parlemen terpusat yang akan menjadi wakil dan menjalankan fungsi politik Swiss (Kenneth 1983, 36).

Dalam perjalanannya, kekuasaan terpusat tersebut justru tidak mampu menjadi jembatan bagi keberlangsungan Swiss sebagai sebuah bangsa multietnis. Seiring dengan kejatuhan Napoleon, Swiss kemudian

merumuskan sebuah konstitusi baru pada 1815. Konstitusi baru ini merujuk pada kegagalan konstitusi sebelumnya serta menggantikan keberadaan parlemen dengan Diet. Konstitusi baru juga membukakan kesempatan bagi persamaan posisi kepada kanton-kanton non-Jerman (Valais, Neuchatel, dan Jenewa) di dalam konfederasi (Schmid 1981, 22). Sayangnya, jika Konstitusi 1803 mengusung sistem yang terlalu terpusat, maka Konstitusi 1815 justru terbukti terlalu desentralisasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik antarkanton sepanjang 1846 serta terjadinya perang saudara Swiss (*the Sonderbund war*) yang meletus pada tahun berikutnya. Perang Sonderbund sendiri hanya berlangsung singkat, yaitu selama 25 hari dengan korban sejumlah 128 orang, baik dari pihak yang mendukung sistem federasi maupun pihak yang mendukung sistem konfederasi (Schmid 2001, 15).

Penyelesaian perang saudara ini kemudian melahirkan kelompok liberal yang berupaya mencari solusi antara konsep federasi dan konfederasi, serta kemudian berhasil merumuskan sebuah konstitusi baru pada 1848 (André 1980, 16). Konstitusi baru ini membentuk dua lembaga politik, yaitu *Standerat* (Dewan Negara) yang dibentuk berdasarkan konsep Diet seperti yang terdapat di dalam Konfederasi lama serta merujuk pada sistem Senat Amerika Serikat. Lembaga ini memberikan masing-masing kanton 2 orang perwakilan. Lembaga politik berikutnya yang terbentuk di bawah konstitusi baru adalah *Nationalrat* (Dewan Nasional) yang dipolakan sama seperti House of Representatives Amerika Serikat, di mana perwakilan tiap-tiap kanton didasarkan pada proporsionalitas jumlah penduduknya. Konstitusi 1848 ini kemudian mengalami sedikit perubahan pada 1874, dengan tujuan menciptakan mekanisme politik yang lebih baik serta memastikan keberimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga politik dalam lingkup keragaman etnis dan linguistik Swiss. Sejak saat itu, Swiss tumbuh menjadi sebuah negara makmur dalam sebuah sistem federasi politik yang stabil.

Swiss Modern: Keragaman dalam Kesatuan

Apa yang dapat dilihat pada Swiss modern hari ini? Sama seperti pada sejarah awal pembentukannya, Swiss memiliki komposisi dan keragaman kelompok etnis dan linguistik. Dengan jumlah penduduk sekitar 7,5 juta, dari jumlah itu sekitar 64 persen penduduknya berbahasa Jerman, 20 persen berbahasa Perancis, sekitar 8 persen berbahasa Italia, dan kurang dari 1 persen berbahasa Romansch. Khusus untuk penggunaan bahasa Romansch, meskipun diakui sebagai bahasa nasional pada tahun 1938 tetapi penggunaannya hanya dalam lingkup terbatas (Carol 2001, 57).

Pada Tabel 1, terlihat angka-angka yang menunjukkan keragaman

linguistik di Swiss. Tabel 1 secara umum mengategorisasikan keragaman linguistik di Swiss ke dalam empat kelompok, meskipun dalam prakteknya terkadang penduduk Swiss bukan hanya menggunakan satu dialek bahasa saja sebagai bahasa pilihannya dalam berinteraksi. Sebagai contoh, pada kenyataannya, semua individu yang menggunakan bahasa Jerman atau biasa disebut sebagai *Schwyzerdutsch*, mereka menggunakan lebih dari 20 dialek berbeda saat berbicara di Swiss. Dari 60.000 pengguna bahasa Romansch, terdapat dua dialek (yang digunakan sebagai bahasa tertulis) dan dua dialek lisan. Pengguna bahasa Italia memiliki tiga dialek yang berbeda. Sementara, pengguna bahasa Perancis adalah satu-satunya kelompok linguistik yang berbicara dan menulis dalam satu dialek yang sama.

Dalam pembagian geografis, kelompok linguistik berkorelasi dengan batas kanton tertentu. Dengan kondisi ini, dari 26 kanton, 17 secara resmi menggunakan bahasa Jerman, 4 kanton berbahasa Perancis, 1 kanton berbahasa Italia, sementara sisa 4 kanton lainnya memiliki dua atau tiga bahasa resmi. Penyebab keragaman linguistik ini jelas didasarkan pada kondisi kompleksitas penyelenggaraan pemerintah bila harus hanya menggunakan satu bahasa tunggal.

Tabel 1
Komposisi Penduduk Swiss berdasarkan Keragaman Bahasa

Tahun	Jerman (%)	Perancis (%)	Italia (%)	Romansch (%)
1910	72,7	22,1	3,9	1,2
1950	74,1	20,6	4,0	1,1
1970	74,5	20,1	4,0	1,0
2004	63,7	19,2	7,6	0,6

sumber: Steinberg, 1992

Keragaman linguistik hanya merupakan salah satu kompleksitas sosial yang ada di Swiss. Dari sisi keragaman agama, Swiss terbagi dalam kelompok Protestan dan Katolik. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa sekitar 40 persen penduduk Swiss beragama Protestan, 46 persen beragama Katolik, sedangkan 14 persen sisanya menyatakan non-Protestan dan non-Katolik. Tabel 2 menyajikan angka yang menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir pemeluk agama Katolik mengalami jumlah peningkatan yang tajam. Kondisi ini bukan hanya dikarenakan meningkatnya faktor kelahiran, tetapi juga disebabkan oleh tingginya angka pekerja asing beragama Katolik (terutama dari Italia) yang masuk ke Swiss. Kelompok non-Protestan dan non-Katolik juga mengalami peningkatan sejak tahun 1970-an. Peningkatan jumlah kelompok ini sebagian disebabkan karena menguatnya pemahaman

sekularisme di perkotaan dan sebagian lagi ditimbulkan oleh kehadiran pekerja dari luar Eropa yang datang ke Swiss dengan membawa keyakinan agama sendiri.

Tabel 2
Komposisi Penduduk Swiss berdasarkan Keragaman Agama

Tahun	Protestan (%)	Katolik (%)	Lain-lain (%)
1910	61,4	37,8	0,8
1950	58,5	40,3	1,2
1970	55,0	43,4	1,6
2004	40,0	46,1	13,9

sumber: Steinberg, 1992

Tabel 1 dan 2 jelas menunjukkan Swiss modern adalah sebuah mosaik besar dari keragaman linguistik, etnis, dan kompleksitas agama. Meskipun demikian, ada sebuah pola menguntungkan sekaligus kecenderungan menarik yang dibentuk oleh keragaman linguistik bila dikaitkan dengan formasi keagamaan Swiss, dimana masing-masing kanton yang memiliki kesamaan linguistik dieratkan oleh meratanya komposisi agama yang dianut. Sebagai contoh, dua kanton berbahasa Perancis, yaitu Vaud dan Neuchatel memeluk agama Protestan. Kanton Geneva yang juga berbahasa Perancis, secara merata terdiri atas pemeluk agama Protestan dan Katolik. Sementara, kanton Valais dan Fribourg yang merupakan kanton bilingual dengan bahasa mayoritas Perancis didominasi oleh mayoritas pemeluk agama Katolik yang kuat.

Kondisi serupa juga terjadi di kanton-kanton yang menggunakan bahasa Jerman, dimana terdapat sembilan kanton berbahasa Jerman yang memeluk agama Protestan, sementara tujuh kanton berbahasa Jerman lainnya memeluk agama Katolik. Satu-satunya kanton berbahasa Italia, yaitu Ticino didominasi oleh pemeluk agama Katolik, sementara kanton berbahasa Romansch memiliki pembagian komposisi agama yang kurang lebih juga seimbang antara Protestan dan Katolik. Meratanya komposisi keragaman linguistik dan agama ini seolah menjadi sebuah jalur pemersatu di antara penduduk Swiss, dimana tidak terdapat satu kelompok bahasa atau agama dengan mayoritas tunggal yang dapat mendominasi dan memaksakan pengaruhnya dalam proses politik (Andreas 2002, 83).

Membangun Bangsa Multi-Etnis

Terdapat tiga faktor yang dapat digunakan menjawab argumentasi

pembentukan Swiss yang stabil, yaitu (1) adanya ancaman militer dari eksternal Swiss, (2) konsep *Swiss-ness* dalam politik dan pemerintahan Swiss, dan (3) kuatnya penerapan nilai-nilai *Swiss-ness*. Masing-masing komponen tersebut dibahas secara rinci berikut ini.

Ancaman Militer dari Eksternal Swiss

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sejarah berdirinya Swiss dimaksudkan sebagai respon terhadap ancaman perang dan invasi pihak luar serta pembentukan berbagai aliansi keamanan kolektif (Halbrok 1998, 43). Baik pembentukan Konfederasi Swiss kuno maupun Federasi Swiss modern adalah pengejawantahan dari tujuan tersebut. Swiss meyakini bahwa proses pembentukan aliansi akan menuntut komitmen kuat pada kesamaan nilai-nilai umum, kehilangan kebebasan dan demokrasi atau bahkan kedaulatan. Swiss tidak menginginkan hal ini, melainkan ingin memiliki kemerdekaan dari kontrol eksternal. Dalam perjalanannya, Swiss kemudian terus disatukan oleh perjuangan dalam upaya konsolidasi dan pembentukan kepercayaan sosial di antara kelompok etnis dan linguistik yang berbeda di Swiss. Carol L. Schmid menyatakan bahwa dalam kasus Swiss, "...konflik berkontribusi pada proses pembentukan bangsa. Perlawanan terhadap kekuatan asing berkontribusi pada proses penyatuan negara, yaitu dengan mengubah rasa perbedaan etnis menjadi perasaan yang mengkristal sebagai satu identitas nasional" (Schmid 1981, 22). Dengan kata lain, adanya ancaman invasi pihak eksternal ditunjang fokus secara terus-menerus pada upaya untuk melindungi batas-batas teritorial, telah membantu mengalihkan perhatian Swiss pada tujuan nasional ketimbang fokus pada keragaman etnis-linguistik.

Pembentukan kekuatan militer Swiss juga lebih merupakan wujud dari sebuah katalisasi sentimen nasional. Sebagai contoh, jenis atau struktur militer yang didirikan Swiss lebih didasarkan pada milisi warga negara dan bukan membentuk tentara resmi Swiss. Pertahanan negara diyakini sebagai tugas setiap orang, tanpa memandang latar belakang etnis. Reformasi besar militer Swiss terjadi pada tahun 2003, dimana Konstitusi Swiss mewajibkan setiap laki-laki Swiss untuk melakukan sebuah dinas militer selama satu tahun dalam setiap periode dua puluh tahun – dapat dilakukan di negara Barat manapun dan hal ini dinyatakan sebagai suatu kewajiban nasional (Marc-Andre, 2004).

Dampak dari keterlibatan setiap warga negara Swiss dalam militer, diharapkan akan menciptakan identitas militer nasional. Semua kelompok etnis diharapkan siap untuk bergabung dalam sebuah militer nasional ketika Swiss diserang atau dalam kondisi menyerang. Dengan kata lain, sebuah serangan terhadap tentara Swiss berarti adalah serangan terhadap negara Swiss secara keseluruhan dimana kekuatan

militer akan bersandar pada seluruh warga Swiss. Serangan yang ditujukan kepada tentara Swiss merupakan serangan bagi identitas dan citra diri orang Swiss. Pemahaman ini membantu menanamkan pandangan bahwa identitas nasional berada di atas identitas etnis yang membantu memperkuat nilai-nilai bersama dalam menjalankan kehidupan politik dan pemerintahan.

Konsep Swiss-ness dalam Politik dan Pemerintahan Swiss

Terlepas dari pemahaman adanya ancaman dari eksternal Swiss, keberhasilan pendirian dan bahkan pembangunan bangsa Swiss adalah juga dikarenakan oleh upaya gigih bersama yang dilakukan oleh berbagai komponen elit Swiss untuk membentuk dan mengukuhkan identitas nasional bersama. Istilah *elite accommodation* dipahami sebagai sebuah jalan tengah dalam mekanisme pengaturan politik di Swiss dimana berbagai kelompok etnis yang ada saling berbagi kewenangan dalam kekuasaan politik berdasarkan rumusan yang telah disetujui bersama. Model perpolitikan dalam pemerintahan Swiss menekankan pentingnya kemampuan dan itikad baik dari elit pemerintahan untuk membantu memperkuat dan memelihara identitas nasional di antara berbagai etnis bangsa.

Sejarah menunjukkan bahwa terciptanya nilai-nilai satu Swiss atau *Swiss-ness* dimulai pada 1700-an ketika elit dan kaum pemikir Swiss berusaha untuk bekerjasama dalam upaya pembentukan identitas nasional. Pengokohan nilai-nilai *Swiss-ness* dalam masyarakat kemudian semakin dikuatkan dengan dibentuknya ratusan asosiasi yang bersifat lintas regional dan multi-etnis dalam lingkup kegiatan dan keanggotaannya. Asosiasi-asosiasi dimaksud di antaranya adalah Asosiasi Seniman Swiss (1807), Asosiasi Pedagogi Swiss (1808), Swiss untuk Masyarakat Umum Baik (1810), Historical Society Swiss (1811), dan Serikat Pekerja Swiss. (1833). Semua asosiasi ini bekerja secara transwilayah, mengadakan pertemuan tahunan secara bergantian di kanton-kanton yang berbeda sehingga secara tidak langsung mendorong keterlibatan tiap-tiap etnis dan kelompok linguistik untuk memiliki penerimaan yang besar terhadap perbedaan etnis dan linguistik yang ada. Kondisi ini akhirnya menekan keberadaan asosiasi yang mendasarkan keanggotaan pada kesamaan etnis dan linguistik, namun memperkuat identitas nasional Swiss berdasarkan kesamaan tujuan politik daripada perbedaan primordial (Andreas 2002, 62).

Upaya menyatukan masyarakat sipil Swiss melalui berbagai asosiasi telah dirumuskan secara jelas pada 1938, yaitu ketika anggota elit Dewan Federal menciptakan sebuah istilah baru, *Geistige Landesverteidigung*, yang berarti pertahanan ideologis nasional yang ditujukan dalam upaya untuk memperjelas gagasan politik Swiss guna

mengurangi meningkatnya ketegangan etnis (Steinberg 1992, 14). Juga dinyatakan secara tegas bahwa semangat nasional Swiss bukan didasarkan pada faktor ras melainkan bersandar pada kehendak kesadaran sebagai satu negara-bangsa nasional. Diyakini bahwa semangat ini tanpa disertai dukungan dari sistem pemerintahan, elit dan asosiasi masyarakat akan sulit terwujud.

Kuatnya Penerapan Nilai-Nilai Swiss-ness

Aspek ketiga sekaligus yang terpenting dalam upaya pembangunan nilai-nilai *Swiss-ness* adalah penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial di antara penduduk Swiss. Penduduk Swiss memahami nilai-nilai *Swiss-ness* sebagai *the spirit of tolerance, restraint and good will towards minorities* (Steinberg 1992, 35). Semangat ini dibangun di bawah Konstitusi Swiss yang diharapkan akan terus melindungi kepentingan semua etnis di Swiss, termasuk kelompok minoritas, tanpa harus memiliki kekhawatiran bahwa kondisi minoritas mereka akan tergerus oleh kelompok yang lebih mayoritas.

Dalam penerapannya, semangat *Swiss-ness* terlihat dalam pola interaksi kehidupan penduduk Swiss keseharian. Sebagai contoh, ketika seorang pengguna bahasa Perancis dan Jerman sedang berbincang, terlepas dari apakah mereka bertemu di wilayah kanton yang menggunakan bahasa resmi Perancis atau Jerman, bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Perancis. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai keberadaan kelompok linguistik berbahasa Perancis yang jumlahnya minoritas dibandingkan kelompok linguistik berbahasa Jerman. Contoh kebiasaan ini, menurut Schmid, dipraktekkan sebagai upaya membangun kenyamanan dan sopan santun bagi kelompok linguistik minoritas.

Secara konstitusional, nilai-nilai toleransi Swiss ini juga diformalkan secara hukum. Kelompok minoritas diberikan keterwakilan yang luas dalam bidang peradilan, pelayanan publik, organisasi federal dan umumnya diberikan hak istimewa serta memiliki jumlah perwakilan dalam pemerintahan melebihi angka proporsionalitas kelompoknya. Toleransi dan negosiasi juga diajarkan dalam sistem pendidikan. Dalam buku teks nasional guru-guru Swiss, diwajibkan sesi khusus untuk mengajarkan *lebenskunde (information for life)* yang menekankan pada pentingnya pemahaman mediasi dan resolusi konflik (Kerr 1994, 58). Di sekolah, teori mediasi dan resolusi konflik diajarkan dan kemudian diterapkan untuk menjelaskan sejarah linguistik dan berbagai konflik budaya yang relevan dengan kondisi Swiss. Maka, semakin jelaslah bahwa bangsa Swiss tetap stabil karena adanya penerimaan sejarah sebagai multietnis. Kondisi ini lantas diselaraskan oleh penerimaan nilai-nilai dan keyakinan bersama sebagai sebuah negara-bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

- Gillett, Nicholas, 1989. *The Swiss Constitution: Can it be Exported?* Bristol: YES Publications.
- Halbrook, Stephen P., 1998. *Target Switzerland: Swiss Armed Neutrality in World War II*. New York: Sarpedon.
- Kerr, Henry H. Jr., 1994. *Switzerland: Social Cleavages and Partisan Conflict*. London: Sage Publications.
- Kohn, Hans, 1956. *Nationalism and Liberty: The Swiss Example*. London: Ruskin House.
- McRae, Kenneth D., 1983. *Conflict and Compromise in Multilingual Societies: Switzerland*. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
- Rappard, William E., 1948. *Collective Security in Swiss Experience: 1291-1948*. London: Bradford & Dickens.
- Schmid, Carol L., 1981. *Conflict and Consensus in Switzerland*. Berkeley: University of California Press.
- _____, 2001. *The Politics of Language: Conflict, Identity, and Cultural Pluralism in Comparative Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Siegfried, André, 1980. *Switzerland: A Democratic Way of Life*. London: Jonathan Cape.
- Steinberg, Jonathan, 1992. *Why Switzerland?* New York: Cambridge University Press.
- Wimmer, Andreas, 2002. *Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikel Online

- Miserez, Marc-Andre, 2004. Debate Heats Up over Swiss Army System, Swissinfo, August 5. [online]. dalam <http://www.swissinfo.org> [diakses 28 Agustus 2009].